

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Latief, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak pidana Korupsi*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2014.
- Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Arifin P. Soeria Atmaja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, Gramedia, Jakarta, 1986.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- H. Jawade Hafidz, Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Hasan Zaini Z., *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1974.
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik indonesia, Posisi dan fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cet. Kedua, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* UI Press, Jakarta, 1986.

Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam irfan fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung 2004.

Suhendar, Konsep Kerugian Keuangan Negara, Malang: Setara Press, 2015.
Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta, 2014.

Yusrizal, *Modul hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Unimal Press, Lhoksema, 2015.

Yuswanto, *Hukum Keuangan Negara*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014.

B. Jurnal

Bachrul Amiq, *Pengawasan BPK Dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Bebas Korupsi*, Jurnal Jatiswara, 31(2), 2017.
<http://repository.unitomo.ac.id/96/>

Chandra Ayu Astuti, Anis Chariri, 2015, *Penentuan Kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP dalam Tindak Pidana Korupsi*, Vol. 4, No. 3.
<https://publish.ojsindonesia.com/index.php/SIBATIK/article/download/17/16>

Dinda Audriene Muthmainah, *Menelisik Cara Kerja BPK dalam Memeriksa Keuangan Negara*, diakses melalui
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170731084819-84-231374/menelisik-cara-kerja-bpk-dalam-memeriksa-keuangan-negara>

Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, (Bogor: Fakultas Hukum Universitas Pakuan, 2009).
https://www.researchgate.net/publication/335249574_UNSUR_KERUGIAN_KEUANGAN_NEGARA_TINDAK_PIDANA_KORUPSI_KERUGIAN_KEUANGAN_NEGARA_PASCA_PUTUSAN_MAHKAMA_KONSTITUSI_NOMOR_25PUU-XIV2016

Hidayatullah, Agus Triono, FX Sumarja “Akuntan Publik: Kewenangan Menghitung Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi”
Jurnal hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol 5, No. 1, 2023 hlm 20, diakses dari 2074-Article Text-10963-1-10-20230124.pdf.

I Made Fajar Pradnyana, I Wayan Parsa, “Kewenangan BPK dan BPKP dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Korupsi”
Kewenangan BPK dan BPKP dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Korupsi Vol 10 No. 2, 2021, hlm 351-352,

diakses

dari

https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Kewenangan+BPK+dan+BPKP+dalam+Menentukan+Kerugian+Keuangan+Negara+pada+Perkara+Korupsi+&btnG=

Iskandar Zulkarnain, Afif Syarif, Ivan Fauzani Raharja, 2019, *Analisis Yuridis Kerugian Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Administrasi Negara*, Jurnal Sains Sosio Huaniora, Vol. 3 No. 1, Jambi, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/7084>

Muhammad Imron Rosyadi, *Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Dalam Menilai Kerugian Keuangan Negara*, Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum, Januari-Juni 2016. <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/view/2206>

Rahmy Putri Yulia, “Peranan BPK dan BPKP menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Rangka Penanganan Perkara Korupsi,” Jurnal Bina Adhyaksa, 2016. [https://www.academia.edu/27787598/PERANAN BPK DAN BPKP MENGHITUNG KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM RANGKA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI_ROLE_OF BPK AND BPKP COUNTING FINANCIAL LOSS IN THE FRAMEWORK OF THE HANDLING OF CORRUPTION CASE](https://www.academia.edu/27787598/PERANAN_BPK_DAN_BPKP_MENGHITUNG_KERUGIAN_KEUANGAN_NEGARA_DALAM_RANGKA_PENANGANAN_PERKARA_TINDAK_PIDANA_KORUPSI_ROLE_OF_BPK_AND_BPKP_COUNTING_FINANCIAL_LOSS_IN_THE_FRAMEWORK_OF_THE_HANDLING_OF_CORRUPTION_CASE)

Tatiek Sri Djatmiati, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, (Surabaya: Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2004), <https://repository.unair.ac.id/32221/>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

-----, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

-----, Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

-----, Undang-Undang Nomo 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

- , Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- , Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP
- , Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2016

D. Sumber Lain

Kamus Umum Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan Nasional*, Edisi ketiga, Jakarta, Percetakan Balai Pustaka, 2005.